



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIC INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA**

Atas Nama	: AFRIZAL
Jabatan	: WAKIL KETUA - PENGADILAN AGAMA CIANJUR - PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
Bidang	: YUDIKATIF
Lembaga	: MAHKAMAH AGUNG
Tanggal / Tahun Pelaporan	: 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Pajak

Layanan Informasi & Pengaduan:

(021) 1500200 

informasi@pajak.go.id 

pengaduan@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomor BPE : **BPE-**
00712/CT/KPP.2506/2026

Tanggal : 12 Januari 2026

NPWP : 1101081404720002

Nama Wajib
Pajak : AFRIZAL

Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Wajib
Pajak Orang Pribadi

Tahun Pajak : 2025

Masa Pajak : Januari - Desember 2025

Status SPT : Normal

Saluran : Portal Wajib Pajak

Tanggal
Terima SPT : 12 Januari 2026



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AFRIZAL
2. Jabatan : WAKIL KETUA
3. NHK : 93567

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.200.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 780 m2/220 m2 di KAB / KOTA TANAH DATAR, Rp. 1.200.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	42.500.000
1. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 42.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	105.550.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	5.100.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.353.150.000
III. HUTANG	Rp.	30.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.323.150.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.